

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Silvi Purnama Devi<sup>1</sup>, Ari Utomo Saputra<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka<sup>1</sup>, Institut Teknologi Sains dan Bisnis  
Muhammadiyah Selayar, Sulawesi Selatan<sup>2</sup>

Email : [silvi20211@gmail.com](mailto:silvi20211@gmail.com)<sup>1)</sup>, [arieutomosaputra@gmail.com](mailto:arieutomosaputra@gmail.com)<sup>2)</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 18 - 12 - 2023

Review : 30 - 12 - 2023

Revised : 03 - 02 - 2024

Accepted : 04 - 02 - 2024

Publish : 08 - 02 - 2024

#### Keywords :

Aset Tetap, PSAP 07,  
Standar Akuntansi

### ABSTRACT

*Fixed assets are resources that clearly have a valuable life of more than one year that are utilized or expected to be utilized in local government operations or for the common good. This research aims to determine the classification, measurement and disclosure of fixed asset bookkeeping applications at Pati Regency Regional Financial and Resource Institutions using government bookkeeping principles. The accounting rules governing the creation and presentation of government financial accounts are known as Government Accounting Standards (SAP). This study uses library research methodology in a qualitative way. This can be achieved by comparing how fixed asset accounting is implemented in the Regional Financial and Resource Institutions of Pati Regency using PSAP No. 07. The results of this research indicate that compliance with the preparation of financial reports at the Regional Asset Financial Institution in the Pati Region is in accordance with Government Accounting Standards Statement No. 07 of 2010 and Government Accounting Standards. In this research, we have complied with PSAP Policy No. 7 concerning reduction, termination, deletion, as well as classification, recognition and assessment.*

### ABSTRAK

Aset tetap adalah sumber daya yang jelas memiliki umur yang berharga lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan atau diharapkan untuk dimanfaatkan dalam operasi pemerintah setempat atau untuk kepentingan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan klasifikasi, pengukuran dan pengungkapan aplikasi pembukuan aset tetap pada Lembaga Keuangan dan Sumber Daya Daerah Kabupaten Pati dengan menggunakan prinsip pembukuan pemerintah. Aturan akuntansi yang mengatur penciptaan dan penyajian rekening keuangan pemerintah dikenal sebagai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Studi ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan dengan cara yang kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan membandingkan bagaimana akuntansi aset tetap diterapkan di Lembaga Keuangan dan Sumber Daya Daerah Kabupaten Pati dengan menggunakan PSAP No. 07. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Keuangan Aset Regional Daerah Pati sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tahun 2010 dan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penelitian ini telah mematuhi Kebijakan PSAP No. 7 tentang pengurangan, penghentian, penghapusan, serta klasifikasi, pengakuan, dan penilaian.

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang telah memiliki kekuatan hukum dan ekonomi dan diumumkan pada tahun 1999. Kekuatan, tanggung jawab, dan hak wilayah otonom untuk mengatur dirinya sendiri dan kepentingan penduduk setempat sesuai dengan hukum dikenal sebagai otonomi regional. (Paragraph 1 Ayat 5 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014). Setelah implementasi Autonomi Regional, tentang Pengolahan Keuangan Regional pada PP Nomor 58 Tahun 2005 telah diterbitkan, mengharuskan semua provinsi, distrik, dan kota di Indonesia untuk mengawasi keuangan daerah dan mengaturnya.

Proses pembuatan laporan keuangan melibatkan upaya untuk menciptakan aset regional. Pertumbuhan sumber daya lokal pasti akan berdampak pada laporan keuangan distrik atau kota, mempengaruhi baik pengeluaran anggaran dan pendapatan. (Saputra, 2017), Laporan keuangan dikumpulkan untuk memberikan rincian yang relevan tentang kondisi keuangan entitas yang melaporkan dan semua transaksinya selama periode pelaporan. Laporan Keuangan juga digunakan untuk menganalisis situasi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi pelaporan, menghitung nilai sumber daya keuangan yang digunakan untuk melakukan operasi pemerintah, dan membantu menentukan kepatuhan hukum.

Potensi aset untuk secara langsung atau tidak langsung mendukung operasi pemerintah melalui aliran pendapatan atau penghematan biaya dikenal sebagai manfaat ekonomi masa depan aset yang terwujud. Aset tetap didefinisikan dalam PSAP No. 07 sebagai aset berwujud yang digunakan oleh masyarakat umum atau untuk keperluan pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pemerintah wajib mencatat setiap aset tetap yang dimilikinya, meskipun digunakan oleh pihak lain, sepanjang masih dalam parameter perjanjian ini. Sementara aset berada di bawah kendali pemerintah dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi pemerintah, aset tetap lainnya, seperti yang dibeli oleh pemerintah untuk diberikan kepada publik, tidak termasuk dalam definisi aset tetap dan tidak dimasukkan dalam arti aset yang tetap. Peran yang dimainkan aset sisa dalam kelancaran organisasi adalah signifikan, dan Dibutuhkan kebijakan manajemen aset tetap yang tepat untuk memaksimalkan peran ini. (Baso dkk, 2020). Seperti situasi tersebut, alat pengambilan keputusan, seperti akuntansi aset tetap, harus penting untuk informasi tentang aset tetap. Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana ditetapkan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, pada nomor yang sama, menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2010. Dua SAP termasuk dalam PP 71 dari 2010 yaitu: SAP berbasis Cash Accrual dimasukkan ke Lampiran II (lisensi tersebut berisi seluruh aturan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanpa satu modifikasi) dan SAP Berbasis Accrual tercantum di Lampiran I. Tanggal pengumuman PP No.71 Tahun 2010 menandai implementasi SAP berbasis akumulasi (Thanwain et al, 2022).

Organisasi pemerintah yang menangani tugas-tugas yang keterkaitan dengan manajemen keuangan dan aset lokal, termasuk pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan aset wilayah, adalah Badan Keuangan dan Aset Regional Daerah Pati. Adapun aset tetap tanah, mesin dan peralatan, struktur dan bangunan, jalan, sistem dan jaringan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang masih dalam pengerjaan dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Regional Distrik Pati. Hal ini menunjukkan tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan PSAP No. 7 yang berlaku di Indonesia pada aset tetap di Badan Keuangan dan Aset Regional Daerah Kabupaten Pati (Thanwain dkk, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Strategi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini didasarkan pada ulasan literature atau pustaka. Teknik penelitian studi pustaka adalah teknik survei yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan saat ini dengan mencari dan membaca berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan publikasi lain yang akurat dengan topik penelitian. Data sekunder dapat berupa dokumen tentang pengelolaan aset tetap. Informasi yang terkandung dalam penelitian ini berasal dari LKPD 2021 Kab. Pati Audited.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Menurut PSAP No. 7 tentang Aset adalah sumber daya keuangan yang dimiliki atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dapat diukur dalam istilah moneter, termasuk non-resource yang diperlukan untuk penyediaan layanan kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dipertahankan untuk alasan sejarah dan budaya. Aset juga merupakan sumber daya dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan diharapkan akan diperoleh, oleh pemerintah dan masyarakat. Pada saldo, aset tetap terdaftar pada samping aset likuid, investasi jangka panjang, uang cadangan, dan aset lainnya. Karena mereka memiliki nilai yang relatif substansial sehubungan dengan komponen lain dari saldo, aset terus memainkan fungsi penting. Menurut PSAP No. 07, Setiap aset material dengan masa pakai yang lebih lama dari dua belas (dua belas) bulan untuk penggunaan publik atau pemerintah dianggap sebagai aset tetap. Pemerintah diminta untuk mendaftarkan setiap aset tetap yang dipunyai, bahkan jika dimanfaatkan oleh pihak lain, selama tetap dalam parameter perjanjian ini. Aset tetap lainnya, seperti yang dibeli pemerintah untuk diberikan kepada publik, dikecualikan dari definisi aset tetap karena mereka tidak sesuai dengan definisi yang dinyatakan sebelumnya, meskipun mereka berada di bawah kendali pemerintah dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi pemerintah.

Dalam penelitian ini menggunakan data pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pati untuk periode 2021. Menurut hasil penelitian Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pati menyatakan bahwa dasar akumulasi adalah basis krusial yang digunakan. Pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan adalah berbasis akrual. Pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan pengakuan akrual atas pendapatan, pengeluaran, dan keuangan saat melaporkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman APBD.

Menurut hasil penelitian pengukuran Aset Tetap dinilai dari biaya perolehan. Menurut PP No.71 Tahun 2010 definisi Biaya akuisisi merupakan jumlah uang yang telah dibelanjakan dalam bentuk uang tunai atau setara tunai, atau jumlah kompensasi yang adil lainnya, untuk membeli aset pada saat konstruksi atau akuisi sampai barang tersebut berada di lokasi dan kondisi yang cocok untuk digunakan. Pemerintah kabupaten Pati menerapkan kebijakan akuntansi tertentu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Regional meliputi komponen biaya perolehan aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Harga pembelian atau biaya pembebasan lahan, biaya konsultasi untuk perencanaan dan pengawasan, dan biaya lain yang timbul untuk mendapatkan hak, termasuk administrasi sertifikat, kelanjutan, pengukuran, penyimpanan, serta biaya lainnya yang timbul sampai lahan siap digunakan.

2. Peralatan dan Mesin

Harga pembelian, biaya konsultasi untuk perencanaan dan pemantauan, pengiriman, instalasi, dan biaya awal lainnya semuanya terkait dengan akuisisi dan persiapan mesin dan peralatan untuk digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya pembelian atau biaya bangunan, termasuk pajak, notaris, dan biaya manajemen IMB. Biaya perencanaan dan pemantauan, peralatan, listrik, sewa peralatan dan biaya lainnya yang terkait dengan penciptaan aset tetap tersebut, termasuk pajak dan notaris, adalah contoh biaya tidak langsung. Biaya pembelian bangunan dan bangunan yang akan dibangun dengan cara yang tidak dikelola termasuk biaya tenaga kerja dan bahan baku secara langsung. Nilai kontrak, selain perencanaan, pengawasan, lisensi, layanan konsultasi, dan pajak, termasuk dalam biaya pembelian struktur dan bangunan yang dibangun berdasarkan kontrak konstruksi.

4. Jalan, Irigasi & Jaringan

Biaya pembelian atau konstruksi, biaya konsultasi untuk perencanaan dan pengawasan, dan biaya lainnya yang timbul sebelum pembukaan jalan, sistem irigasi, dan jaringan.

## 5. Aset Tetap Lainnya

Semua biaya yang timbul untuk memperoleh aset tersebut sampai mereka siap digunakan. Biaya yang terkait dengan perencanaan dan pemantauan, pajak, lisensi, dan pengeluaran nilai kontrak adalah biaya pengadaan tambahan untuk aset tetap yang diperoleh melalui kontrak. Biaya tambahan pembelian aset yang dialami oleh manajemen, seperti untuk upgrade ke properti tetap, termasuk biaya langsung dan tidak langsung, yang termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa peralatan, perencanaan dan pengawasan, pajak, lisensi, dan layanan konsultasi.

Pengungkapan Aset Tetap, Menurut PSAP No 07 untuk menyesuaikan jumlah yang dicatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Peningkatan, Pembebasan, Akumulasi Pengurangan, dan perubahan nilai, jika ada dari mutasi aset tetap lainnya, laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap jenis aset tetap dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai yang dicatatkan. Selain itu, perhatikan spesifikasi deduksi, termasuk nilai catatan bruto, teknik pengurangan, periode manfaat atau tingkat penguraian, nilai penurunan, dan akumulasi kontraksi pada awal dan akhir periode waktu (Rarobong dkk, 2023). Menurut hasil penelitian Penurunan terjadi ketika nilai aset yang dapat dikurangi secara sistematis didistribusikan selama masa hidup yang menguntungkan. Pada akhir setiap bulan, penurunan aset masih dihitung dan dicatat dan menurut Peraturan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 51 Tahun 2021, penghitungan beban pengurangan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengurangan beban bulanan sepanjang periode perhitungan. Total penyusutan pada tahun 2020 dan 2021 menambahkan Rp(1.695.787.786.627,76) dan Rp(1.438.860.499.222,47, terdapat kenaikan akumulasi penyusutan di tahun 2021 sebesar Rp256.927.287.405,29 atau 17,86%.

Dalam PSAP 07, Aset tetap dari bilangan tersebut dikategorikan ke dalam enam akun berikut ini :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

### 1. Tanah

Tanah milik negara atau dikendalikan dianggap sebagai aset tetap dan diperuntukkan bagi kegiatan pemerintahan atau dipergunakan oleh public dan dalam keadaan siap digunakan. Properti yang ditunjuk untuk konstruksi jalan, bangunan, sistem irigasi, dan koneksi telepon untuk penggunaan perumahan harus dipisahkan dari properti permanen yang terletak di sana. SAP menyatakan bahwa biaya pembelian digunakan untuk menilai aset lahan yang tercatat; dalam kasus ketika mendapatkan nilai historis aset tidak praktis atau tidak mungkin, nilai estimasi digunakan sebagai gantinya.

**Tabel 1. Saldo pada aset tetap tanah**

Uraian	Saldo awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2021 (Rp)
Tanah	3.253.421.025.831,00	587.306.419.286,00	604.446.907.286,00	3.236.280.537.571,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Penambahan aset tetap tanah tahun anggaran 2021 yang dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2. Penambahan aset tetap pada tanah periode 2021.**

No	Penambahan Aset Tetap Tanah	Nilai (Rp)
1.	BOT	6.313.188.000,00
2.	Kerjasama pemanfaatan	77.730.286,00
3.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	280.000.000,00
4.	Hibah Masuk	19.800.000,00
5.	Mutasi OPD Masuk	6.094.863.800,00
6.	Koreksi Pencatatan	574.498.296.940,00
7.	Penambahan tanah dari tukar menukar	22.540.000,00
<b>JUMLAH</b>		587.306.419.026,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Pengurangan aset tetap Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 604.446.907.286,00 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3. Pengurangan aset tetap pada tanah periode 2021.**

No	Pengurangan Aset Tetap Tanah	Nilai (Rp)
1.	Penghapusan	22.540.000,00
2.	Mutasi OPD Keluar	6.094.863.800,00
3.	Koreksi Pencatatan	591.938.585.200,00
4.	BOT	6.313.188.000,00
5.	Kerjasama Pemanfaatan	77.730.286,00
<b>JUMLAH</b>		604.446.907.286,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

## 2. Peralatan dan Mesin

Selama mereka bekerja, mesin dan peralatan yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara dan tersedia untuk digunakan oleh publik atau dalam kegiatan resmi disebut sebagai aset tetap. Peralatan berat, peralatan transportasi, lokakarya dan peralatan pengukuran, perlengkapan pertanian, peralatan untuk rumah dan tempat kerja, studio rekaman, peralatan untuk komunikasi dan transmisi, komputer, alat laboratorium, alat untuk eksplorasi dan pengeboran, perlengkapan untuk manufaktur, peranti untuk pemrosesan, dan peralatan pembersihan, bantuan eksploratif, alat keselamatan kerja, alat keamanan, dan unit peralatan proses produksi hanyalah beberapa contoh aset tetap yang termasuk dalam kategori peralatan dan mesin. Menurut SAP, mesin dan peralatan dengan masa pakai setidaknya satu tahun didokumentasikan dalam saldo di tingkat yang sama dengan harga pembelian.

**Tabel 4. Saldo aset tetap pada peralatan dan mesin.**

Uraian	Saldo awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2021 (Rp)
Peralatan dan Mesin	793.426.496.608,31	117.625.552.183,59	48.341.099.703,59	862.710.949.088,31

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Peningkatan aset pada peralatan dan mesin tahun 2021 sejumlah Rp117.625.552.183,59 dapat dijabarkan berikut ini :

**Tabel 5. Penambahan aset pada peralatan dan mesin periode 2021.**

No.	Penambahan Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin	Nilai (Rp)
1.	Ekstra Kompatabel 2020	21.274.996.670,59
2.	Rusak Berat Masuk Aset Lain lain 2020	478.599.000,00
3.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	59.981.234.812,00
4.	Belanja Non Modal (reklas ke modal)	1.246.196.952,00
5.	Hibah masuk	20.295.991.779,00
6.	Mutasi OPD masuk	2.627.048.192,00
7.	Koreksi Pencatatan	11.721.484.778,00
<b>JUMLAH</b>		117.625.552.183,59

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Pengurangan pada aset peralatan dan mesin Tahun 2021 sejumlah Rp.48.341.099.703,59 dapat dijelaskan berikut ini :

**Tabel 6. Pengurangan aset tetap pada peralatan dan mesin periode 2021.**

No.	Pengurangan Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin	Nilai (Rp)
1.	Penghapusan sebesar Rp2.145.994.102,00 terdiri dari :	
	- Selain Lelang Kendaraan Dinas	264.098.000,00
	-Lelang Kendaraan Dinas	1.881.896.102,00
2.	Reklas Belanja Modal 2021 ke Non Modal	521.125.300,00
3.	Hibah Keluar	49.500.000,00
4.	Mutasi OPD Keluar	2.627.048.192,00
5.	Koreksi Pencatatan	9.607.839.251,00
6.	Ekstra Kompatabel 2021	24.311.321.858,59
7.	Rusak Berat Masuk Aset Lain-Lain 2021	9.078.271.000,00
<b>JUMLAH</b>		48.341.099.703,59

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

### 3. Gedung dan Bangunan

Negara memiliki atau mengendalikan bangunan dan struktur yang siap digunakan untuk umum atau untuk digunakan dalam kapasitas resmi. Bangunan dan struktur ini disebut aset tetap. Ini merupakan beberapa jenis bangunan yaitu : menara, lampu, monumen, dan struktur. Aset bangunan, menurut SAP, memiliki masa pakai setidaknya satu tahun dan didokumentasikan dalam saldo di tingkat yang sama dengan harga akuisisi.

**Tabel 7. Saldo aset tetap gedung bangunan.**

Uraian	Saldo awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2021 (Rp)
Gedung dan Bangunan	1.289.335.781.347,89	162.465.117.914,00	80.450.050.370,90	1.371.350.848.890,89

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited



Penambahan aset pada gedung dan bangunan di tahun 2021 sebesar Rp162.465.117.914,00 dengan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 8. Penambahan aset tetap pada gedung dan bangunan periode 2021.**

No.	Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan	Nilai (Rp)
1.	Rusak Berat Masuk Aset Lain-Lain 2020	55.000.000,00
2.	Belanja Modal 2021	80.339.787.834,00
3.	Belanja Non Modal (reklas ke modal)	711.396.477,00
4.	Hibah Masuk	4.902.778.000,00
5.	Mutasi OPD Masuk	26.015.047.998,00
6.	Koreksi Pencatatan	162.465.117.914,00
<b>JUMLAH</b>		162.465.117.914,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Pengurangan pada aset gedung dan bangunan di tahun 2021 yaitu menjadi Rp80.450.050.370,90 dengan penjelasan berikut ini :

**Tabel 9. Pengurangan aset tetap pada gedung dan bangunan periode 2021.**

No.	Pengurangan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai (Rp)
1.	Penghapusan	3.152.675.521,90
2.	Reklas ke Non Modal	950.941.369,00
3.	Mutasi OPD Keluar	26.015.047.998,00
4.	Koreksi Pencatatan	50.163.303.855,00
5.	Pengembalian Belanja Modal Tahun Lalu	168.081.627,00
<b>JUMLAH</b>		80.450.050.370,90

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

#### **4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah, sistem irigasi, dan jaringan yang berfungsi dengan baik dan digunakan untuk tujuan resmi atau oleh masyarakat umum semuanya dianggap aset tetap. Di antara aset permanen yang termasuk dalam kategori ini

adalah jaringan, bangunan air, instalasi, jalan raya dan jembatan, dan instalasi. Aktiva jalan, irigasi, dan jaringan diakui dalam saldo setara dengan harga akuisisi, menurut SAP dan memiliki masa hidup keuntungan setidaknya satu tahun.

**Tabel 10. Saldo aset tetap pada aktiva jalan, irigasi dan jaringan.**

Uraian	Saldo awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2021 (Rp)
Irigasi dan Jaringan	1.792.375.511.712,75	173.517.608.478,00	65.550.728.901,00	1.900.342.391.289,75

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Peningkatan pada aset jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2021 sejumlah Rp173.517.608.478,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 11. Penambahan pada aset jalan, irigasi dan jaringan periode 2021.**

No.	Penambahan Aset Tetap pada aktiva Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	125.811.164.889,00
2.	Belanja Non Modal (reklas ke modal)	199.466.000,00
3.	Hibah Masuk	800.915.250,00
4.	Mutasi OPD Masuk	747.697.803,00
5.	Koreksi Pencatatan	45.958.364.536,00
<b>JUMLAH</b>		173.517.608.478,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Pengurangan pada aset jalan, irigasi dan jaringan di Tahun 2021 sejumlah Rp65.550.728.901,00 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 12. Pengurangan aset pada jalan, irigasi dan jaringan periode 2021.**

No.	Pengurangan pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai (Rp)
1.	Penghapusan	87.000.000,00
2.	Reklas Belanja Modal 2021 ke Non Modal	1.677.993.754,00
3.	Mutasi OPD Keluar	747.697.803,00
4.	Koreksi Pencatatan	62.465.524.280,00
5.	Pengembalian Belanja Modal Tahun Lalu	572.513.064,00
<b>JUMLAH</b>		65.550.728.901,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

### 5. Aset Tetap Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang sesuai dengan kriteria aset tetapi tidak dapat ditempatkan di salah satu divisi aset yang disebutkan. Aset tambahan ini mungkin termasuk hal-hal seperti seni, budaya, olahraga, atau koleksi perpustakaan / buku. SAP mengklaim bahwa aset tetap lainnya dengan masa pakai keuntungan setidaknya satu tahun ditampilkan dalam saldo pada tingkat yang sama dengan harga akuisisi.

**Tabel 13. Jumlah saldo aset tetap lainnya.**

Uraian	Saldo awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2021 (Rp)
Aset tetap lainnya	97.734.585.547,14	17.714.039.415,02	12.983.682.591,02	102.464.942.371,14

Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp17.714.039.415,02 dengan penjelasan berikut ini :

**Tabel 14. Penambahan pada aset tetap lainnya periode 2021.**

No.	Penambahan pada Aset Tetap Lainnya	Nilai (Rp)
1.	Ekstra Kompatabel 2020	12.857.789.201,02
2.	Rusak Berat Masuk Aset Lain-Lain 2020	6.700.000,00
3.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	4.709.827.902,00
4.	Hibah Masuk	16.732.500,00
5.	Koreksi Pencatatan	122.989.812,00
<b>JUMLAH</b>		17.714.039.415,02

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp12.983.682.591,02 dengan penjelasan berikut ini :

**Tabel 15. Pengurangan pada aset tetap lainnya periode 2021.**

No.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya	Nilai (Rp)
1.	Penghapusan	6.500.000,00
2.	Koreksi Pencatatan	112.693.390,00
3.	Ekstra Kompatabel 2021	12.857.789.201,02
4.	Rusak Berat Masuk Aset Lain-Lain 2021	6.700.000,00
<b>JUMLAH</b>		12.983.682.591,02

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

#### 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap yang terdapat dalam konstruksi tetapi tidak sepenuhnya selesai pada tanggal neraca disertakan dalam pembangunan yang sedang diselesaikan. SAP menyatakan bahwa konstruksi yang masih dalam proses termasuk dalam saldo harga akuisisi dan memiliki masa pakai minimal 12 bulan.

**Tabel 16. Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan**

Uraian	Saldo awal 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2021 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.188.862.694,00	22.230.097.833,00	4.743.928.804,00.	41.675.031.723,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Penambahan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 sebesar Rp22.230.097.833,00 dapat dijelaskan berikut ini :

**Tabel 17. Penambahan pada konstruksi dalam pengerjaan periode 2021.**

No.	Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai (Rp)
1.	Belanja Non Modal (reklas ke modal)	224.525.000,00
2.	Koreksi Pencatatan	22.005.572.833,00
<b>JUMLAH</b>		22.230.097.833,00

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 sebesar Rp4.743.928.804,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 18. Pengurangan pada konstruksi dalam pengerjaan periode 2021**

No.	Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Pencatatan	4.556.874.094,00
2.	Pengembalian Belanja Modal Tahun Lalu	187.054.710,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.743.928.804,00</b>

Sumber : LKPD 2021 Kab. Pati Audited

## PEMBAHASAN

Aset Tetap pada BKAD Kabupaten Pati terdiri atas Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset tetap lainnya; dan Kontruksi dalam pengerjaan. Seperti yang dinyatakan dalam PSAP No. 7, aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan struktur dan fungsi dalam kegiatan operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan seberapa mirip struktur atau fungsi mereka dengan entitas yang berada di bawahnya. Entitas-entitas ini selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori seperti Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, aset tetap lainnya, dan Konstruksi. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi aset tetap pada BPKD telah sesuai dengan PSAP No. 7 dan Standar Akuntansi Pemerintah. Aset dihapus dari saldo dan keuntungan keuangan di masa depan tidak ditampilkan dalam catatan laporan keuangan ketika itu dijual atau tidak lagi digunakan. Konsep penyesuaian aset tidak memungkinkan pemerintah setempat untuk menghapus aset tetap dari penggunaan terus-menerus; sebaliknya, aset harus dipindahkan ke rekening aset tetap lainnya sesuai dengan nilai buku mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati sudah sesuai dengan PSAP 07. Penerapan Mengenai aset tetap yang telah mengadopsi SAP berdasarkan akumulasi, Pernyataan No. 07 (SAP) dan Undang-Undang No. 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Pemerintah No. 25 Tahun 2014 ke Kebijakan Akuntansi Regional. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Properti Regional. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Lembaga Keuangan dan Aset di Pati County, semua aspek perlakuan akuntansi aset seperti distribusi aset tetap, identifikasi aset, pengukuran aset padat, pengeluaran awal setelah akuisisi, penghentian dan penarikan, dan pengungkapan aset permanen tetap

berlaku. Sesuai dengan PSAP No. 07, Badan Keuangan Aset Kabupaten Pati melakukan pengurangan aset tetap dengan menerapkan pendekatan pengurangan garis lurus. Alasannya karena setelah masa manfaatnya berakhir, kelebihanannya tidak digunakan lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alimus, E. (2020) Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. 6(1), 52 – 63.
- Baso, R., Bintary, Selviani, & Sumarni. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (online). Vol. 1. No. 1. <http://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>.
- Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 27 – 38. doi : <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252>
- Idris, M. (2019). Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Bosowa Makassar, Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Salemba Empat. Jakarta. IAI.
- LKPD 2021 Kab. Pati. [https://www.patikab.go.id/v2/id/lkpd-2021-kab-pati\\_audited/](https://www.patikab.go.id/v2/id/lkpd-2021-kab-pati_audited/)
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Nooraini. A., Mamulak, C. D. R. R & Sinurat, M. (2022) Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara. *ejournal.ipdn*, 2(1), 1 – 11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- | Pernyataan  | Standar | Akuntansi | Pemerintah | No. | 7. |
|---|---------|-----------|------------|-----|----|
| <a href="https://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf">https://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf</a> |         |           |            |     |    |
- Rarobong, A. K., Ilat, V., & Afandi, D. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No. 07. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum(Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1177 – 1184.
- Rohmah.S . N . M & Husnurrosyidah. (2022) Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 96 – 102.
- Saputra, A. U. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sengkey, C., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 441 - 450.

- Thanwain & Amri, N. F. (2022) Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Mirai Management* , 7(2), 195 – 205.
- Trismayanti, M. (2021). *Pengantar Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. Mila Trismayanti